MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27/Kpts./HK.140/M/01/2026
TENTANG
DEREGULASI PERATURAN MENTERI PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa deregulasi Peraturan Menteri Pertanian, diperlukan untuk menciptakan tata kelola yang akuntabel, mengatasi hambatan, mempercepat layanan, meningkatkan daya saing guna mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan dan hilirisasi produk pertanian, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Deregulasi Peraturan Menteri Pertanian;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.010/07/2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 999);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG DEREGULASI PERATURAN MENTERI PERTANIAN.

KESATU : Menetapkan Deregulasi Peraturan Menteri Pertanian yang selanjutnya disebut Deregulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum pada Unit Kerja Eselon I selaku Pemrakarsa:
a. menyusun rencana tindak lanjut Deregulasi yang memuat minimal target dan waktu penyelesaian; dan
b. melaporkan perkembangan realisasi Deregulasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap triwulan kepada Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum pada Sekretariat Jenderal.

KETIGA : Deregulasi dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan dan dapat diperpanjang berdasarkan arahan Menteri Pertanian.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2026

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:
1. Menteri Koordinator Bidang Pangan;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Menteri Hukum;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
6. Para Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2026

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Koordinator Bidang Pangan;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Menteri Hukum;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
6. Para Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27/KPTS./HK.140/M/01/2026
TENTANG 12 Januari 2026
DEREGULASI PERATURAN MENTERI PERTANIAN

DEREGULASI PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NO.	REGULASI	JUDUL	UNIT KERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 tahun 2017	Kelas Mutu Beras	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
2.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 tahun 2018	Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih	
3.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021	Standar Usaha dan Standar Produk Perizinan Usaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian	
4.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 127 tahun 2014	Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman	
5.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2020	Komando Strategi Penggilingan Padi	
6.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2020	Penyediaan dan Penyaluran Beras Dalam Rangka Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Melalui Anjungan Tunai Mandiri Beras	
7.	-	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pembinaan Industri Penggilingan dan Penyosohan Beras	

NO.	REGULASI	JUDUL	UNIT KERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/HR.060/5/2017 juncto Permentan Nomor 17/PERMENTAN/HR.060/4/2018 26/Permentan/HR.060/5/2018	Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura	Direktorat Jenderal Hortikultura
9.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2021	Praktik Hortikultura Yang Baik	
10.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/ Permentan/KB.020/9/2015	Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan	Direktorat Jenderal Perkebunan
11.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2023	Peningkatan Produksi dan Produktivitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Tanaman Perkebunan	
12.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021	Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
13.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2006	Pedoman Pembibitan Kerbau Yang Baik	
14.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2010	Pedoman Pembibitan Kelinci Yang Baik (*Good Breeding Practice*)	
15.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2011	Pedoman Pembibitan Ayam Ras Yang Baik	
16.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 102 Tahun 2014	Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba Yang Baik	

NO.	REGULASI	JUDUL	UNIT KERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
17.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 100 Tahun 2014	Pedoman Pembibitan Sapi Perah Yang Baik	
18.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 101 Tahun 2014	Pedoman Pembibitan Sapi Potong Yang Baik	
19.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79 Tahun 2014	Pedoman Pembibitan Ayam Asli dan Ayam Lokal yang Baik	
20.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2014	Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur Yang Baik	
21.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2014	Pedoman Budidaya Burung Puyuh Yang Baik	
22.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2015	Pedoman Budi Daya Sapi Potong Yang Baik	
23.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2017	Pendaftaran dan Peredaran Pakan	
24.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010	Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*).	
25.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020	Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan	
26.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020	Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan	
27.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51 Tahun 2011	Pemasukan Benih dan/atau Bibit ke Dalam Wilayah Negara RI.	
28.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57 Tahun 2015	Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan Ke dan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia	

NO.	REGULASI	JUDUL	UNIT KERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
29.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09 Tahun 2018	Pemasukan Obat Hewan Khusus Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	
30.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2018	Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi Dari Wilayah Negara Republik Indonesia	
31.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 Tahun 2019	Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya untuk Pangan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	
32.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2019	Pemasukan Ternak Ruminansia Besar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	
33.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2019	Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan Ke dan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia.	
34.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2021	Kajian Lapang dan Pengawasan Obat Hewan	
35.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019	Pelayanan Jasa Medik Veteriner	
36.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2025	Pelayanan Perkawinan Ternak	
37.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor Permentan 03 Tahun 2021	Fasilitasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian	
38.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor Permentan Nomor 75 Tahun 2011	Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian	
39.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor Permentan Nomor 26 Tahun 2020	Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Sarang Burung Walet Ke dan Dari Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	

NO.	REGULASI	JUDUL	UNIT KERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
40.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/8/2013	Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi
41.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012	Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	
42.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/12/2012	Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air	
43.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023	Fasilitasi Asuransi Pertanian	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
44.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/PP.140/11/2016	Perubahan atas Permentan Nomor 75/Permentan/OT.140/11/2011 Tahun 2023 tentang Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian	
45.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2023	Fasilitasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian	
46.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014	Pengawas Pestisida	
47.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2020	Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian	
48.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020	Pembiayaan Usaha Tani	

NO.	REGULASI	JUDUL	UNIT KERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
49.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/OT.140/3/2011	Pedoman Penilaian Penyuluh Pertanian Teladan	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
50.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/PERMENTAN/OT.140/3/2011	Pedoman Penilaian Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan	
51.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 72/PERMENTAN/OT.140/10/2011	Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian	
52.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/PERMENTAN/OT.140/4/2012	Pedoman Penilaian Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi	
53.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/PERMENTAN/OT.140/2013	Pedoman Penilaian Kelembagaan Ekonomi Berprestasi	
54.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 91/PERMENTAN/OT.140/9/2013	Pedoman Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian	
55.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/PERMENTAN/OT.140/3/2015	Pedoman Pengawalan dan Pendampingan Terpadu Penyuluh, Mahasiswa, dan Bintara Pembina Desa Dalam Rangka Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai	
56.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/PERMENTAN/SM.010/9/2016	Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian	
57.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016	Pembinaan Kelembagaan Petani	
58.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/PERMENTAN/SM.200/1/2018	Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	
59.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2021	Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian	

NO.	REGULASI	JUDUL	UNIT KERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
60.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27 Tahun 2023	Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian	
61.	-	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Mekanisme dan Tata Hubungan Kerja Kelembagaan yang membidangi Pertanian	
62.	-	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Pangan	
63.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2018	Pedoman Alih Teknologi Pertanian	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
64.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/7/2011	Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman	
65.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/OT.140/3/2009	Pedoman Penyusunan Perjanjian Pengalihan Material (*Material Transfer Agreement*)	
66.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2007	Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman	
67.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/12/2007	Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan	
68.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2020	Pengawasan dan Pengendalian Varietas Tanaman Produk Rekayasa Genetik Pertanian Yang Beredar di Wilayah Republik Indonesia	

NO.	REGULASI	JUDUL	UNIT KERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
69.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2023	Perubahan atas Permentan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pengawasan dan Pengendalian Varietas Tanaman Produk Rekayasa Genetik Pertanian Yang Beredar di Wilayah Republik Indonesia	
70.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2016	Pengkajian Keamanan Pakan Produk Rekayasa Genetik	
71.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2023	Perubahan atas Permentan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pengkajian Keamanan Pakan Produk Rekayasa Genetik	
72.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/PERMENTAN/HM.130/8/2018	Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim Pada Sektor Pertanian	

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

NO.	REGULASI	JUDUL	UNIT KERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
69.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2023	Perubahan atas Permentan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pengawasan dan Pengendalian Varietas Tanaman Produk Rekayasa Genetik Pertanian Yang Beredar di Wilayah Republik Indonesia	
70.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2016	Pengkajian Keamanan Pakan Produk Rekayasa Genetik	
71.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2023	Perubahan atas Permentan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pengkajian Keamanan Pakan Produk Rekayasa Genetik	
72.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/PERMENTAN/HM.130/8/2018	Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim Pada Sektor Pertanian	

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN